KEUANGAN DAERAH-APBK
2022
QANUN NO 3, LK 2022/NO 3, 89 HLM.
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT

ABSTRAK - untuk melaksanakan ketentuan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Qanun Kabupaten Aceh Barat tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Barat.

- Dasar Hukum Qanun Kabupaten Aceh Barat ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 7 (Drt) Tahun 1956; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 2022; UU Nomor 1 Tahun 2022; PP Nomor 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 65 Tahun 2010; PP Nomor 12 Tahun 2019 PERMENDAGRI Nomor 77 Tahun 2020; Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2020.

- Dalam Qanun Kabupaten Aceh Barat diatur tentang Pengelola Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah, Penyusunan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, Kekayaan Daerah dan Utang Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, Informasi Keuangan Daerah, Pembinaan dan Pengawasan dan Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Qanun Kabupaten Aceh Barat ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Juni 2022.

- Penjelasan 27 hlm.